

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT  
UNTUK TETAP MEMPERTAHANKAN DIBERLAKUKANNYA  
SANKSI EMBARGO EKONOMI DEWAN KEAMANAN  
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP IRAK**

**SKRIPSI**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

Oleh :

HERU SUCIPTO

NIM. 079615205

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GASAL TH. 2001/2002**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 18 Januari 2002

Dosen Pembimbing,



Dra. Lilik Salamah, M.Si.


NIP. 131 569 360

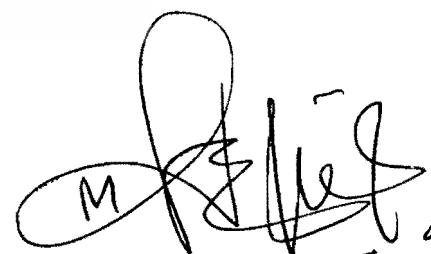
## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang ujian skripsi

Pada tanggal 24 Januari 2002



  
Drs. DJOKO SULISTYO, M.S.  
NIP. 131 453 807

  
M. MUTTAQIEN, S.I.P.  
NIP. 132 230 968

## ABSTRAK

Sanksi embargo ekonomi Dewan Keamanan PBB telah dijatuhkan kepada Irak sejak tahun 1990. Sanksi tersebut sebagai akibat dari invasi Irak kepada Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Sehingga memaksa Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 660 Dewan Keamanan PBB yang menetapkan tindakan Irak sebagai pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional, serta menyerukan penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait.

Sanksi embargo ekonomi terhadap Irak secara bilateral telah dilakukan oleh Amerika Serikat melalui *Executive Order* 12722, yang berisi blokade atas properti pemerintah Irak dan pelarangan transaksi dengan Irak. Sedangkan secara multilateral melalui resolusi 661 Dewan Keamanan PBB, yang berisi pemberlakuan sanksi embargo ekonomi yang bersifat menyeluruh kepada Irak dan hanya mengecualikan terhadap barang-barang untuk tujuan medis, kemanusiaan dan bahan pangan.

Sampai sejauh ini berarti sanksi tersebut telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun. Akan tetapi masih belum ada tanda-tanda bahwa sanksi tersebut akan dicabut. Meskipun dampak daripada sanksi tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi rakyat Irak, sebagaimana temuan yang dipaparkan oleh UNICEF, FAO, WHO, dan WFP dalam laporannya pada Mei-Juni 2000 tentang situasi pangan dan gizi di Irak yang berada dalam kondisi memprihatinkan. Pertanyaan yang timbul adalah mengapa Amerika Serikat mengambil kebijakan untuk tetap mempertahankannya sanksi embargo ekonomi terhadap Irak dan kepentingan-kepentingan apa saja yang mendasarinya? Pertanyaan ini kemudian dikaji dengan menggunakan beberapa teori, konsep dan model, diantaranya konsep kepentingan nasional, konsep *power*, teori persepsi, model interaksi dan model *rational decision making*. Unit analisa dalam penelitian ini berada dalam tingkat negara-bangsa, dan unit eksplanasinya berada dalam tingkat negara-bangsa dan sistem.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan AS untuk tetap mempertahankannya sanksi embargo ekonomi Dewan Keamanan PBB terhadap Irak dilandasi oleh persepsi AS yang berasal dari kebijakan masa lalu yang dinilai gagal dan berbagai informasi yang membentuk pengetahuan bahwa potensi ancaman dari *power* Irak yang masih dinilai membahayakan, terutama dari *power* militer Irak yang berkaitan dengan program pengembangan NBC Irak. Alasan yang kedua adalah karena keuntungan-keuntungan strategis yang diperoleh AS, baik dalam kepentingan ekonomi (stabilitas harga minyak dan hasil penjualan senjata ke negara-negara tetangga Irak), kepentingan tata dunia (hegemoni kawasan, hegemoni penjualan senjata, dan perlindungan terhadap Israel), kepentingan ideologi (penyebaran nilai demokrasi dan HAM), maupun kepentingan pertahanan (pembebasan sandera dan penumpasan terorisme internasional). Sehingga kesimpulannya karena persepsi ancaman AS dan keuntungan strategis yang diperoleh AS.

**Kata kunci :** Embargo ekonomi AS, Persepsi, Keuntungan Strategis, Irak.